

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah

memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Keberhasilan atau kegagalan Peningkatan Pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala desa, yang sejauh mana kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen.

Berkaitan dengan proses pembangunan desa, di dalam prosesnya pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa di mana kepala desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas urusan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang dinyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dari tugas kepala desa seperti tersebut di atas, maka kepala desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin.

Pemimpin formal itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya Kepemimpinan kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Tujuan pembangunan Kabupaten Bantul pada tahun 2012-2016 yang merupakan implementasi dari misi salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di dalam area perdesaan yang modern dengan menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru (sentra ekonomi atau produksi baru) tumbuh 10% dan infrastruktur perdesaan meningkat 10%.¹ Sesuai dengan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul tersebut menarik untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bawuran Kecamatan Pleret karena Desa Bawuran adalah salah satu dari lima Desa di Kecamatan Pleret yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah sebagian besar dusun telah dilalui akses jalan kabupaten dan pusat pemerintahan sedangkan kelemahannya adalah wilayahnya sebagian besar perbukitan bebatuan sehingga untuk menanam padi hanya bila musim penghujan akan tetapi bila musim kemarau akan kesulitan mendapatkan air bersih sedangkan alasan lainnya adalah karena faktor personal Kepala Desa yang terpilih pada periode jabatan kedua kalinya sehingga menarik untuk mengetahui peranan Kepempinan Kepala Desa di Desa Bawuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul **“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2014”**.

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepemimpinan kepala desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tahun 2014?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Kepemimpinan Kepala Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tahun 2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan.

b. Bagi instansi terkait dan masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah atau Dinas Instansi terkait, serta Pemerintahan Desa sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengartikan peran sebagai berikut:

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”²

Pengertian peran menurut Jack C Plano, Robert E Riggs dan Gellena

S. Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”³

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal, yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132.

³ Jack C. Plano, Robert E. Riggs & Hellena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edi S Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (*role performance*)”. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturisasi dan paham interaksionis. Paham strukturisasi lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu

⁴ Soerjono, Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal 269

keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya.⁵

Tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya – bagi kategori umum – maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang

⁵ Ibid

yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2. Kepemimpinan

Pada dasarnya kegiatan manusia secara bersama-sama membutuhkan pemimpin. Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi dalam menjalankan misinya sangat tergantung kepada tanggung-jawab dari seorang pemimpin. Untuk itu kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai suatu tujuan organisasi.⁶

Secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Berasal dari kata dasar "pimpin" berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua pihak yang yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam)
2. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi "pemimpin) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Apabila ditambah akhiran "an" menjadi "pimpinan" artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dengan pimpinan dapat dibedakan yaitu pimpinan (kepala) cenderung lenih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.
4. Setelah dilengkapi dengan awalan "ke" menjadi Kepemimpinan (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam

⁶ Miftah Thoha, 2001, *Prilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 227

mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.⁷

Lebih lanjut Thoha mengemukakan bahwa seorang pemimpin apapun wujudnya, dimanapun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.⁸

Kartini Kartono berpendapat bahwa :

“Pemimpin dalam arti luas ialah seorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan eksepstansi/penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya.⁹

Menurut Robins ada empat pendekatan terhadap teori kepemimpinan, diantaranya yaitu: (1) Teori Atribusi Kepemimpinan; (2) Teori Kepemimpinan Karismatik; (3) Teori Kepemimpinan *Visioner*; dan (4) Teori Kepemimpinan Transformasional versus Kepemimpinan Transaksional. Menurut teori atribusi kepemimpinan dikatakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat seseorang bagi individu-individu lain. Sedangkan di dalam teori kepemimpinan karismatik, para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-prilaku tertentu. Selanjutnya dalam teori kepemimpinan *visioner*, pemimpin berkemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang atraktif, terpecah, realistik tentang masa depan suatu organisasi atau unit organisasi. Dalam kepemimpinan Transaksional, pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka

⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, 2013, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 105

⁸ Miftah Thoha, *op.cit*, hlm 227

⁹ Kartini Kartono, 1998, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm 33.

dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan aturan tugas, sedangkan dalam pemimpin transformasional, pemimpin memberikan pertimbangan dan ransangan intelektual yang diindividualkan, dan yang memiliki karisma.¹⁰

Mengingat besarnya arti kepemimpinan dalam organisasi, maka seorang pemimpin harus mampu dan dapat memainkan peranannya, pemimpin harus mampu menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkannya di dalam unit organisasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg bahwa ada tiga peran utama yang dimainkan oleh setiap *manajer* di manapun letak hirarkinya. Peran tersebut meliputi: (1) Peran Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*); (2) Peran yang Berhubungan dengan Informasi (*Informational Role*); dan (3) Peran Pembuat Keputusan (*Decisional Role*).¹¹

Jadi, seseorang baru dapat dikatakan pemimpin apabila ia dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang formal dalam organisasi.

Salah satu cara untuk menilai suksesnya atau gagalnya pemimpin dalam memimpin antara lain dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas/mutu prilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugandha sebagai berikut :

¹⁰ Stephen Robbins, P, 1994, *Teori Organisasi, Struktur, Desain Dan Aplikasi*, Arcan, Jakarta (Terjemahan), hlm 24

¹¹ Miftah Thoha, 2001, op.cit, hlm 232-240.

“Seorang pemimpin memiliki sifat-sifat unggul sehingga mampu menempatkan diri pada posisinya secara efektif terhadap segala hubungan yang terjadi antara sesama anggota atau antara kelompok. Masalah-masalah yang dihadapi serta kondisi dan situasi organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu dalam usaha mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar bersedia melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Tidak mustahil apabila tiap-tiap pemimpin mempunyai gaya atau cara tersendiri dalam memimpin atau mendorong bawahannya”¹².

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengkoordinir seluruh aktifitas kelompok suatu organisasi, terlebih organisasi di tingkat Pemerintah Desa Bawuran dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih *profesional* dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keberadaan dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengkoordinir seluruh aktifitas kelompok organisasi pemerintahan serta mengarahkan pegawai dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga pada akhirnya dapat pula menciptakan dan/atau menghambat *profesionalisme* dari sumber daya aparatur dalam organisasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Kartono bahwa :

“Fungsi kepemimpinan ialah : memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik; memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan”¹³.

¹² Dann Sugandha, 1986, *Kepemimpinan dalam Administrasi*, Sinar Baru, Bandung. hlm 70.

¹³ Kartini Kartono, *op.cit*, hlm 81

Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala Desa dalam dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

3. Kepala Desa

a. Defenisi Pemerintahan Desa dan Kepala Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suhartono mengemukakan bahwa "Desa" ialah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.. Sedangkan Pratikno mengemukakan bahwa istilah desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, pertama desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas

dalam kesatuan geografis tertentu yang antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Kedua, desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan, melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara¹⁴

Kemudian pengertian Pemerintahan Desa sendiri, menurut Suhartono, yaitu :

“Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa”

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ Suhartono, 2000, *Politik Lokal*, Laper, Yogyakarta, hlm 131-132

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu:

- a. Sebagai stabilisator
- b. Sebagai inovator
- c. Sebagai pelopor

Pemerintah Desa menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

b. Tugas, Wewenang, Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang dinyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Edi Suharto pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu

dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.¹⁵

Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Talcot Parsons kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.¹⁷

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri

¹⁵ Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT RefikaAditama, hlm 59

¹⁶ Pranaka dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS). Hlm 56.

¹⁷ Ginanjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas, 1996, Hal. 249

(Priyono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya

b. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sutrisno, ada lima macam, yaitu:¹⁸

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan

¹⁸ Sutrisno Momon S, 1983, *Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 18.

optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.¹⁹

c. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.²⁰

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai

¹⁹ *Ibid*, hlm 17

²⁰ Edi Suharto *op.cit*, hlm 62.

bentuk pemberdayaan yang paling efektif . Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Menurut Kartasasmita, upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:²¹

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

d. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari

²¹ Ginanjar Kartasasmita, *op.cit*, Hal. 19

pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didaya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Sedangkan menurut Edi Suharto pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:²²

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang

²² Edi Suharto, *op.cit*, hlm 218-219

lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

E. Definisi Konsepsional

1. Peranan adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta fungsi sesuai dengan kedudukannya.
2. Kepemimpin adalah merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk

mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.

3. Kepala Desa adalah pemimpin dalam pemerintahan desa
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa desa dalam pemberdayaan masyarakat
 - a. Membina perekonomian desa
 - b. Membina kehidupan penduduk desa
 - c. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
2. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - 1) Peningkatan penghasilan masyarakat
 - 2) Meningkatkan produksi pertanian
 - b. Pembangunan sumber daya manusia
 - 1) Pembinaan generasi muda
 - 2) Perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

c. Pembangunan fisik

- 1) Perbaiki drainase pada badan jalan
- 2) Pembangunan dan Perbaiki saluran irigasi tersier

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan kepala desa di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Keturunan yang dimaksud disini adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia bisa memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat.
- 2) Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang terpancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.
- 3) Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kondisi penduduk adalah keadaan masyarakat yang beraneka-ragam.
- 2) Partisipasi penduduk adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam program pemberdayaan
- 3) Tersedianya fasilitas atau peralatan yang dapat menunjang lancarnya kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai ciri :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.²³

Jadi dalam penelitian yang mempunyai metode deskriptif adalah data tentang masalah yang diteliti itu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis untuk memberi memberikan gambaran faktual mengenai Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam menyusun karya tulis ini. Dalam hal ini unit analisisnya adalah pemerintahan Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, disini

²³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknis Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1987, hal. 132.

penulis akan mewawancarai beberapa aparat Desa sebagai sumber data penelitian ini yaitu:

1. Bapak Harmawan selaku Kepala Desa Bawuran
2. Bapak Isnandar Hadi selaku Carik Desa Bawuran
3. Bapak Hendri Santoso, Amd selaku Kabag Pembangunan Desa Bawuran
4. Bapak H. Suwandi BA selaku Kabag Keuangan
5. Bapak Noto Raharjo selaku Ketua Gapoktan Desa Bawuran.
6. Bapak Sumardi selaku Kepala Dusun Bawuran I
7. Bapak Thukul Raharjo selaku Kepala Dusun Bawuran II
8. Bapak Gusmanto selaku Kepala Dukuh Jambon
9. Bapak Hari Santoso, Pardi Raharjo, Suhardi Ibu Sumiyati masyarakat Desa Bawuran

4. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari buku-buku, laporan hasil penelitian, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen yang ada di Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar yang dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi.

b. Interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bawuran.

6. Teknik Analisa Data

Teknik menganalisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.